

**ANALISIS KETIMPANGAN SOSIAL TERHADAP PENCAPAIAN KOTA JAMBI
MERAH PERINGKAT UTAMA KOTA LAYAK ANAK
STUDI KASUS PEKERJA ANAK**

Chrisna Syahputra¹, Melisa², Siti Tiara Maulia³

^{1,2,3}PPKn, FKIP, Universitas Jambi

¹abangchris25@gmail.com, ²sititiaramaulia@unja.ac.id, ³melisa88@unja.ac.id

ABSTRACT

Jambi City was awarded the Main Category of the Child-Friendly City (Kota Layak Anak) designation in 2025. However, findings from observations, interviews, and documentation revealed that child labor remains prevalent in several areas of the city, indicating a discrepancy between policy achievements and the actual conditions experienced by children. This study aims to analyze the social inequality factors contributing to the persistence of child labor and to examine prevention efforts based on Max Weber's theory of social stratification. The research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through triangulation. The findings indicate that child labor is influenced by family economic constraints, low parental educational attainment and social acceptance of child labor, as well as the suboptimal implementation of child protection policies. Prevention efforts include strengthening family economic resilience, increasing public awareness, and improving the implementation of child protection policies. The study concludes that the Child-Friendly City (Kota Layak Anak) designation has not yet fully reflected the substantive fulfillment of children's rights, highlighting the need for more effective and sustainable policy implementation.

Keywords: social inequality, child labor, Child-Friendly City (Kota Layak Anak), child protection.

ABSTRAK

Kota Jambi memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) Peringkat Utama pada tahun 2025. Namun, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pekerja anak masih ditemukan di beberapa wilayah Kota Jambi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara capaian kebijakan dan kondisi nyata yang dialami anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ketimpangan sosial yang memengaruhi masih terjadinya pekerja anak serta upaya pencegahannya berdasarkan teori stratifikasi sosial Max Weber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,

sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan penerimaan sosial terhadap pekerja anak, serta belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa predikat Kota Layak Anak belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya hak anak secara substantif sehingga diperlukan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: ketimpangan sosial, pekerja anak, Kota Layak Anak, perlindungan anak.

A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari pembangunan sosial karena menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun, pekerja anak masih menjadi permasalahan di berbagai negara berkembang karena berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak (Guntara & Husin, 2021). Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga implementasi kebijakan yang efektif dan mampu menjangkau kelompok rentan (Dian & Sidauruk, 2023).

Di Indonesia, perlindungan anak diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (Siskasari, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, keberhasilan KLA diukur melalui lima klaster dan dua puluh empat indikator. Dengan demikian, predikat Kota Layak Anak tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari (Resia & Widayanti, 2025)

Ichsan et al, (2026) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan regulasi atau kebijakan semata, tetapi memerlukan implementasi yang efektif serta penguatan kesadaran masyarakat melalui Pendidikan

Kewarganegaraan agar hak-hak warga negara dapat terpenuhi secara substantif. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian administratif, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial yang nyata di masyarakat.

Kota Jambi memperoleh predikat Kota Layak Anak Peringkat Utama pada tahun 2025. Namun, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi masih menunjukkan adanya pekerja anak di beberapa kawasan, seperti Simpang Empat Bank Indonesia Kecamatan Telanaipura dan Jalan Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Sungai Kambang. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian kebijakan dan realitas sosial, sehingga mengindikasikan bahwa implementasi perlindungan anak belum sepenuhnya mampu mengatasi praktik pekerja anak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga oleh ketimpangan sosial yang memengaruhi distribusi sumber daya, status sosial, dan pelaksanaan kebijakan (Ali et al., 2023). Penelitian

ini menggunakan teori stratifikasi sosial Max Weber yang menjelaskan bahwa ketimpangan sosial terbentuk melalui dimensi kelas, status, dan kekuasaan (Weber, 1947). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara kondisi ekonomi keluarga, penerimaan sosial terhadap pekerja anak, dan implementasi kebijakan perlindungan anak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Kota Layak Anak masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat (Yuliana, 2022). sedangkan praktik pekerja anak dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, dan belum optimalnya perlindungan hukum (Adrian, 2021). Namun, penelitian tersebut belum mengkaji pekerja anak melalui perspektif ketimpangan sosial di daerah yang telah memperoleh predikat Kota Layak Anak Peringkat Utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor ketimpangan sosial yang memengaruhi masih terjadinya pekerja anak serta upaya pencegahannya di Kota Jambi berdasarkan perspektif stratifikasi

sosial (Weber, 1947). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya mengenai hak asasi manusia, kebijakan publik, dan keadilan sosial, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi kebijakan Kota Layak Anak.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui pengungkapan makna, pengalaman, serta interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik berdasarkan perspektif subjek penelitian dalam konteks alamiah. Pendekatan ini dinilai sesuai untuk mengkaji fenomena pekerja anak yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan

implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Jambi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena penelitian difokuskan pada satu kasus tertentu, yaitu masih ditemukannya pekerja anak di Kota Jambi meskipun daerah tersebut telah memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) Peringkat Utama Tahun 2025. Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor ketimpangan sosial yang memengaruhi keberadaan pekerja anak berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan lokasi utama pengamatan berada di kawasan Simpang Empat Bank Indonesia Kecamatan Telanaipura dan sepanjang Jalan Kolonel Amir Hamzah Kelurahan Sungai Kambang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena berdasarkan hasil observasi awal masih ditemukan anak-anak yang bekerja pada kawasan tersebut. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

(DPMPPA) Kota Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak dan pelaksanaan program Kota Layak Anak.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Informan terdiri atas Kepala Bidang Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi, pekerja anak, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi penelitian. Variasi informan tersebut dipilih agar data yang diperoleh mampu menggambarkan fenomena pekerja anak dari perspektif pemerintah, pelaku, maupun lingkungan sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pekerja anak pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial, jenis pekerjaan, serta interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan pedoman

wawancara semi-terstruktur sehingga peneliti tetap memiliki keleluasaan menggali informasi sesuai perkembangan data di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan evaluasi Kota Layak Anak, foto kegiatan penelitian, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pekerja anak di Kota Jambi.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013), yang meliputi reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor ketimpangan sosial penyebab pekerja anak. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan dimensi kelas, status, dan kekuasaan menurut teori Max Weber sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara induktif dengan menghubungkan hasil temuan lapangan, teori yang digunakan, serta penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena pekerja anak di Kota Jambi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.Faktor Penyebab terjadinya pekerja anak di Kota Jambi

a. Keterbatasan Ekonomi Keluarga Mendorong Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga merupakan faktor utama yang mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas kerja di Kota Jambi. Berdasarkan hasil observasi di kawasan Simpang Empat Bank

Indonesia Kecamatan Telanaipura dan sepanjang Jalan Kolonel Amir Hamzah Kelurahan Sungai Kambang, masih ditemukan anak yang bekerja sebagai pengamen, penjual makanan ringan, penjual tisu, dan melakukan aktivitas ekonomi informal lainnya di ruang publik. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa anak bekerja karena penghasilan orang tua yang tidak tetap, tingginya kebutuhan rumah tangga, serta terbatasnya kesempatan kerja, sehingga anak ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai program perlindungan anak melalui kebijakan Kota Layak Anak, kondisi ekonomi sebagian keluarga masih mendorong anak untuk bekerja sebagai strategi mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan teori ketimpangan sosial Weber (1947), kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pada dimensi kelas (class) yang berkaitan dengan posisi individu atau kelompok dalam struktur ekonomi masyarakat. Keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarga memiliki

kemampuan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga anak turut dilibatkan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam pekerjaan mencerminkan ketimpangan kelas yang masih dialami sebagian masyarakat Kota Jambi, di mana kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang memengaruhi pemenuhan hak-hak anak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan anak bekerja sejak usia dini. Oleh karena itu, masih ditemukannya pekerja anak di Kota Jambi menunjukkan bahwa predikat Kota Layak Anak belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan pekerja anak tidak hanya memerlukan perlindungan hukum, tetapi juga penguatan kondisi ekonomi keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

b. Rendahnya Pendidikan Orang Tua dan Penerimaan Sosial terhadap Pekerja Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadinya pekerja anak di Kota Jambi juga dipengaruhi oleh

rendahnya tingkat pendidikan orang tua serta adanya penerimaan sosial terhadap keterlibatan anak dalam aktivitas kerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendidikan dan perlindungan hak anak sehingga aktivitas bekerja dianggap sebagai hal yang wajar selama dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan tersebut didukung oleh hasil observasi yang memperlihatkan bahwa anak-anak tetap melakukan aktivitas ekonomi di ruang publik tanpa memperoleh penolakan dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat cenderung memberikan uang atau membeli barang dagangan anak sebagai bentuk kepedulian, yang secara tidak langsung memperkuat keberadaan pekerja anak. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai sosialisasi mengenai perlindungan anak, namun perubahan pola pikir masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan pekerja anak.

Berdasarkan teori ketimpangan sosial Weber (1947), kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan

pada dimensi status (status). Status berkaitan dengan penghargaan, pengakuan, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan orang tua memengaruhi pemahaman terhadap pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, sedangkan penerimaan masyarakat terhadap anak yang bekerja membentuk pengakuan sosial bahwa praktik tersebut merupakan sesuatu yang dapat diterima. Kondisi ini menyebabkan pekerja anak terus bertahan karena didukung oleh nilai dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan orang tua dan toleransi masyarakat terhadap pekerja anak menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Oleh karena itu, pencegahan pekerja anak tidak hanya memerlukan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga peningkatan kesadaran orang tua serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak agar penerimaan sosial terhadap pekerja anak dapat diminimalkan.

c. Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pekerja Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukannya pekerja anak di Kota Jambi dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan anak. Meskipun Kota Jambi telah memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) Peringkat Utama pada tahun 2025, hasil observasi masih menemukan anak yang bekerja di ruang publik sebagai pengamen, penjual makanan ringan, penjual tisu, dan melakukan aktivitas ekonomi informal lainnya. Hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program perlindungan anak, seperti sosialisasi hak anak, pembentukan forum anak, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Namun, implementasi program tersebut masih menghadapi kendala, antara lain belum optimalnya jangkauan terhadap pekerja anak di sektor informal, keterbatasan sumber daya, serta kondisi ekonomi keluarga yang

menyebabkan sebagian anak kembali bekerja setelah memperoleh pembinaan. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan pekerja anak tetap terjadi.

Berdasarkan teori ketimpangan sosial Weber (1947), kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pada dimensi kekuasaan (power). Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan pemerintah atau institusi dalam melaksanakan kebijakan serta memengaruhi perilaku masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota Jambi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengurangi keberadaan pekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan masih dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan pekerja anak perlu dilakukan melalui penguatan implementasi kebijakan yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar tujuan Kota Layak Anak dapat diwujudkan secara lebih efektif.

2. Upaya Pencegahan Pekerja Anak di Kota Jambi

a. Penguatan Ekonomi Keluarga sebagai Upaya Mengurangi Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekonomi keluarga merupakan upaya utama dalam mencegah keterlibatan anak dalam aktivitas kerja. Hasil wawancara dengan DPMPPA Kota Jambi menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja anak berasal dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga anak turut

membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak bekerja setelah pulang sekolah maupun pada hari libur untuk membantu orang tua. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, meskipun efektivitasnya masih perlu diperkuat agar menjangkau keluarga yang berisiko melibatkan anak dalam pekerjaan.

Dalam perspektif ketimpangan sosial Weber (1947), upaya tersebut berkaitan dengan dimensi kelas (class), yaitu peningkatan kondisi ekonomi keluarga agar anak tidak lagi terdorong untuk bekerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan ekonomi keluarga menjadi langkah preventif yang penting dalam mengurangi pekerja anak. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan strategi yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan sosial yang bersifat sementara.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Hak Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam pencegahan pekerja anak. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kota Jambi secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi mengenai hak anak melalui berbagai lembaga dan forum masyarakat. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memberikan uang atau membeli barang dagangan anak di ruang publik sebagai bentuk kepedulian. Tindakan tersebut secara tidak langsung mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi yang dilakukan anak.

Dalam perspektif ketimpangan sosial Weber (1947), kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi status (status), yaitu nilai dan pengakuan sosial yang berkembang di masyarakat. Selama pekerja anak masih dianggap sebagai hal yang wajar, upaya perlindungan anak akan sulit berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, pendidikan, serta kolaborasi antara

pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membangun lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak.

c. Penguatan Implementasi Program dan Kebijakan Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan implementasi program dan kebijakan perlindungan anak merupakan upaya strategis dalam mencegah pekerja anak di Kota Jambi. Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program perlindungan anak melalui sosialisasi, pembentukan forum anak, layanan konsultasi keluarga, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, hasil observasi masih menemukan anak yang bekerja di ruang publik sehingga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi praktik pekerja anak.

Berdasarkan teori ketimpangan sosial Weber (1947), kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi kekuasaan (power), yaitu kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kebijakan yang telah tersedia belum sepenuhnya mampu memengaruhi kondisi sosial yang menyebabkan anak tetap bekerja, terutama karena masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dan penerimaan masyarakat terhadap pekerja anak. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, perluasan jangkauan program perlindungan anak, penguatan pengawasan, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan akses pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pekerja anak di Kota Jambi memerlukan upaya yang terintegrasi melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, dan optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan anak. Ketiga upaya tersebut saling berkaitan dalam mengatasi ketimpangan pada dimensi kelas, status, dan kekuasaan sehingga pemenuhan hak anak dapat diwujudkan secara lebih efektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, masih terjadinya pekerja anak di Kota Jambi dipengaruhi oleh ketimpangan sosial pada dimensi kelas, status, dan kekuasaan menurut teori stratifikasi sosial (Weber, 1947). Pada dimensi kelas, keterbatasan ekonomi keluarga mendorong anak terlibat dalam aktivitas kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada dimensi status, rendahnya pendidikan orang tua dan penerimaan sosial terhadap pekerja anak menyebabkan praktik tersebut masih dianggap sebagai hal yang wajar. Sementara itu, pada dimensi kekuasaan, implementasi kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam pekerjaan meskipun Kota Jambi telah memperoleh predikat Kota Layak Anak Peringkat Utama.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pencegahan pekerja anak memerlukan penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak anak, serta optimalisasi implementasi program dan kebijakan perlindungan anak secara terpadu. Kebaruan penelitian terletak pada temuan adanya

kesenjangan antara keberhasilan administratif Kota Layak Anak dan realitas masih ditemukannya pekerja anak. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan perlindungan anak tidak hanya diukur dari pencapaian indikator administratif, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan pemenuhan hak anak secara nyata melalui penguatan aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Y. A. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*.
- Ajhie Guntara, M., & Husin, A. (2021). Eksploitasi Anak Sebagai Penjual Asongan Di Kota Palembang. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 5(2), 122–130.
<https://doi.org/10.15294/Pls.V5i2.46644>
- Ali, B., Primayani, F. D., & Putri, M. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103.
<https://doi.org/10.33701/Jurnalr egistratie.V5i2.3554>
- Dian, A., & Sidauruk, B. (2023). Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues

- Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 02(01), 23–35.
<https://doi.org/10.32734/Nlr.v2i1.11386>
- Ichsan, M., Maulia, S. T., & Melisa. (2026). *Peran Strategis Pendidikan Kewarganegaraan Pada Dekonstruksi Norma Patriarki Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Resia, U., & Widayanti, S. (2025). Kota Layak Anak: Antara Label Dan Substansi Pemenuhan Hak Anak. *Journal Of Indonesian Rural And Regional Government*, 9(1), 66–77.
<https://doi.org/10.47431/Jirreg.V9i1.624>
- Siskasari, A. (2021). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 1(3), Layouting.
<https://doi.org/10.18196/Jpk.V1i3.11203>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Weber, M. (1947). *The Theory Of Social And Economic Organization*.
- Yuliana. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Makassar*.